

**EVALUASI DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PADA KELOMPOK SASARAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI KELURAHAN BAKUNG
KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT)**

Skripsi

Oleh

Maliki

NPM. 1816041057



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Abstract

Impact Evaluation of the Family Hope Program (PKH) as an Effort to Reduce Poverty in Bandar Lampung City in 2023 (Case Study in Bakung Sub-District, Teluk Betung Barat District)

By

Maliki

Poverty remains a persistent social issue and a focal point of government attention in Indonesia, including in Bandar Lampung City. One of the government's efforts to alleviate poverty is through the Family Hope Program (PKH), a conditional cash transfer program aimed at poor and vulnerable families. This study aims to evaluate the impact of the Family Hope Program (PKH) implementation in Bandar Lampung City in 2023, with a case study conducted in Bakung Sub-district, Teluk Betung Barat District. The research employed a qualitative approach with a descriptive method, and data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis used the policy evaluation model by William N. Dunn, covering indicators of effectiveness, responsiveness, accountability, equity, output, and outcome. The results indicate that the implementation of PKH in Bandar Lampung has been generally effective and responsive in alleviating the economic burden of beneficiary families. However, issues remain regarding the accuracy of beneficiary targeting and community dependency on the cash assistance provided. Therefore, it is recommended to strengthen the verification process of beneficiaries and optimize empowerment programs to ensure the sustainable independence of beneficiary families.

Keywords: Policy Evaluation, Family Hope Program (PKH), Policy Impact, Poverty, Community Empowerment.

Abstrak

Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 (Studi Kasus di Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat)

Oleh

Maliki

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi fokus perhatian pemerintah di Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tersebut adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung tahun 2023, dengan studi kasus di Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi indikator efektivitas, responsivitas, akuntabilitas, keadilan, output, dan outcome. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung secara umum telah berjalan cukup efektif dan responsif dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Namun, masih ditemukan kendala terkait ketepatan sasaran penerima bantuan dan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan tunai yang diberikan. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan proses verifikasi data penerima manfaat serta optimalisasi program pemberdayaan agar keluarga penerima manfaat dapat mandiri secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), Dampak Kebijakan, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat.

**EVALUASI DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PADA KELOMPOK SASARAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI KELURAHAN BAKUNG
KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT)**

Oleh

Maliki

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Administrasi Negara**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 (Studi Kasus di Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat)

Nama Mahasiswa : Maliki

Nomor Pokok Mahasiswa : 1816041057

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Dedy Hernawan, S. Sos., M.Si.
NIP. 197507202003121002


Eko Budi Sulistio, S. Sos., M.AP.
NIP. 197809232003121001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 2001122002

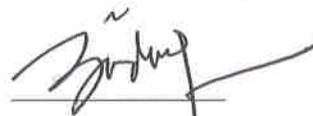
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Dedy Hermawan, S. Sos., M.Si.



Sekretaris : Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP.



Penguji : Meiliyana, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

: 13 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Maliki
NPM. 1816041057

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Maliki, dilahirkan di Padasuka, Provinsi Lampung pada tanggal 02 April 2000. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Biterman (Alm) dan Ibu Sumiyah. penulis berkebangsaan Indonesia, bersuku Lampung, dan beragama Islam. penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Tanjung Harapan yang diselesaikan pada tahun 2012, dilanjutkan di SMP Gajah Mada Kota Bandar Lampung yang diselsaikan pada tahun 2015, dan SMA Muhammadiyah 2 Kota Bandar Lampung yang diselsaikan pada tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur PMPAP (Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan).

Penulis terlibat dalam kegiatan magang di BPN Provinsi Lampung dan di tempatkan di Unit Kepegawaian Pada tahun 2021 selama 40 hari. Selain itu, penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2021 di Desa Sinarjati Hajimena Natar Lampung Selatan selama 40 hari.

MOTTO

**"Situasi akan mengajarkanmu arti kehidupan yang sebenarnya"
(Maliki, 2025)**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, karya ini di persembahkan kepada;

Kedua Orang Tuaku Mama dan Papah (Alm), serta Kakak-kakakku Tersayang Terima kasih untuk cinta, doa, dan dukungan yang tanpa batas. Kalian adalah alasan sampai sekarang diri ini masih semangat untuk terus bertumbuh dan berkembang. Skripsi ini bentuk terima kasih kecil dan simbol rasa bangga untuk dukungan dan doa kalian untukku selama berkuliah,

Diriku Sendiri

Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah menyelesaikan study dan skripsi ini. Skripsi ini piala kebanggaanmu yang telah berhasil menjadi seorang sarjana.

Seluruh Dosen Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Terima kasih atas semua ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama berkuliah sebagai bekal menghadapi dunia luar.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji syukur penulis ucapkan atas segala berkah yang diberikan oleh Allah Yang Maha Esa serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Kelompok Sasaran Di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 (Studi Kasus Di Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca yang dapat berkembang pada masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain :

1. Allah SWT karena atas berkat limpahan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kedua orang tua yang paling berharga dalam hidupku yaitu Ibuku Sumiyah dan Ayahku Biterman (Alm), terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, semangat, serta doa restu di setiap langkah perjalananku hingga di tahap ini dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dari Bab I–V dengan sabar serta banyak memberikan masukan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah Bapak selalu dilancarkan oleh Allah SWT.
4. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan sabar serta banyak memberikan masukan dan arahan dalam proses penyelesaian

skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam segala hal oleh Allah SWT.

5. Ibu Meliyana, S.IP., M.A. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala hal.
6. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis selama proses pendidikan hingga akhir. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala hal.
7. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan serta bantuan bagi penulis.
11. Untuk kakakku tersayang Hernani dan abangku Erwan, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan untukku dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk saudara-saudaraku yaitu keluarga besar Ibu, yaitu Bapak Sarno dan Ibu Munarsih yang telah membantu dan selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Sudarmono selaku Pembimbing PKH di Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan informasi dalam proses penelitian ini.
14. Kepada sahabat-sahabatku yang ada di rumah (Alim, Angga, Tika, Arya, Zirki, Aditya) yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada teman-teman seperjuanganku dari awal menjadi mahasiswa baru hingga di titik ini, yaitu teman-teman Andalusia (Khozin, Krisdi, Andi, Tedjo, Daniel, Lardi, Januar, Kiset, Avin, Andi) yang telah banyak membantu dan kebersamai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
16. Teman magang Fahrezi di BPN Provinsi Lampung yang telah membantu, khususnya selama masa magang dan dalam proses penyusunan skripsi ini.
17. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri sendiri, yang telah mampu berjuang dan bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini atas apa yang telah penulis mulai.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf yang sebesar besarnya apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025

Maliki

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pikir.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik.....	8
B. Dampak Kebijakan.....	12
C. Evaluasi Kebijakan.....	13
D. Konsep Dasar Kemiskinan.....	14
E. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan.....	19
F. Program Keluarga Harapan (PKH).....	24
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Instrumen Penelitian.....	33
E. Jenis dan Sumber Data.....	33
F. Teknis Pengumpulan Data.....	34
G. Pengujian Validitas Realibitas.....	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	36
B. Pembahasan Penelitian.....	58

V. PENUTUPAN

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	.Halaman
1. Data jumlah penerima PKH di Kota Bandar Lampung Tahun 2023.....	3
2. Data PKH 2023 – Kelurahan Bakung (DKS via Dinsos dan DTKS).....	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	7

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terjadi di berbagai Negara baik negara maju maupun negara selain berkembang. Kemiskinan juga menjadi masalah di negara maju menimbulkan masalah dan menjadi fokus pemerintah dalam menanggulangnya. Kemiskinan yang terus meningkat terjadi karena ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baik diiringi dengan penghasilan mereka yang masih di bawah standar.

Pemerintah selaku *policy maker* tentu menggunakan kewajibannya untuk membuat sebuah kebijakan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Tim Nasional Penganggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) membagi program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui empat klaster.

Klaster pertama berupa bantuan dan perlindungan social. Melalui program ini pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Klaster kedua, pemberdayaan masyarakat yang diibaratkan sebagai kail. Melalui program ini pemerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Klaster ketiga, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diibaratkan sebagai perahu. Melalui program ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 33 bank, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, BNI Syariah serta 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan klaster keempat program pro rakyat yang berupa program, Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PASIMAS).

Permasalahan kemiskinan yang sampai saat ini masih mengakar dan belum dapat teratasi disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat miskin selalu kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan layak. Kemiskinan yang selama ini mengakar selain dikarenakan muncul dalam berbagai dimensi terdapat pula beberapa faktor yang berperan menjadi penyebab terjadinya kemiskinan, diantaranya adalah: 1) ketidakberuntungan (*disadvantages*) yang melekat pada keluarga miskin, 2) keterbatasan kepemilikan aset (*poor*), 3) kelemahan kondisi fisik (*physically weak*), 4) keterisolasian (*isolation*), 5) kerentanan (*vulnerable*), dan 6) ketidakberdayaan (*powerless*).

Dalam rangka pengurangan kemiskinan diperlukan langkah-langkah strategis yang memungkinkan untuk menekan angka jumlah kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang terus meningkat menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan yang dipilih dalam pembangunan selama ini perlu diperbaiki ke arah pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya terfokus pada sebatas bagaimana meningkatkan ekonomi, tetapi juga terfokus pada bagaimana meningkatkan moral serta keberdayaan masyarakat sehingga pengentasan kemiskinan yang dilakukan berbasis kepada masyarakat.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan yang ada saat ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pendekatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu langkah yang dapat diambil agar masyarakat dapat berkembang dan menjadi mandiri.

Menurut data Dinas Sosial Bandar Lampung pada tahun 2022 jumlah KPM PKH di Kota Bandar Lampung mencapai angka 38.286 keluarga (13,79%) naik dari tahun 2020 yang berada pada angka 36.460 keluarga (12,02%). Data jumlah sebaran KPM PKH di Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Data jumlah penerima PKH di Kota Bandar Lampung Tahun 2023

NO	KECAMATAN/KERLURAHAN	JUMLAH PKH (KELUARGA)
1	Bumi Waras	2.930
2	Enggal	829
3	Kedamaian	1.359
4	Kedaton	1.451
5	Kemiling	2.044
6	Labuhan Ratu	1.113
7	Langka Pura	1.261
8	Panjang	3.558
9	Rajabasa	1.349
10	Sukabumi	2.350
11	Sukarame	1.016
12	Tanjung Seneng	932
13	Tanjung Karang Barat	2.298
14	Tanjung Karang Timur	2.013
15	Tanjung karang Pusat	1.434
16	Teluk Betung Barat	2.451
17	Teluk Betung Selatan	2.267
18	Teluk Betung Utara	3.389
19	Teluk Betung Timur	1.920
20	Wayhalim	2.322

(Sumber : Data dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2023)

Berdasarkan tabel di atas jumlah penerima PKH tertinggi di Kota Bandar Lampung berada di Kecamatan Panjang dengan jumlah 3.558 keluarga, sedangkan jumlah penerima PKH terendah berada di Kecamatan Enggal sebanyak 829 keluarga. Sebagai program pengentasan kemiskinan PKH diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Namun, dikarenakan PKH merupakan program bantuan bersyarat yang masih memberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat penerima PKH, sehingga menurut beberapa penelitian maupun jurnal yang sudah diterbitkan, pemberian bantuan dalam bentuk tunai dikhawatirkan dapat menyebabkan ketergantungan sehingga membuat masyarakat terjatuh dalam kemiskinan.

Kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang tepat dan strategis mendistribusikan dukungan pendapatan bersyarat kepada orang miskin dan yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah mengambil keputusan tegas untuk menerapkan dukungan pendapatan bersyarat yang memadai. Dalam hal ini, penggunaan Bantuan pendapatan Bersyarat untuk Keluarga Sangat Miskin (KSM) menjadi sasara, ternyata penyaluranya tetap menggunakan masyarakat yang bukan merupakan kelompok sasaran.

Tabel 2. Data PKH 2023 – Kelurahan Bakung (DKS via Dinsos & DTKS)

Wilayah Administratif	Sumber Data / Tahun	Jumlah KPM PKH 2023	Catatan
Kecamatan Teluk Betung Utara	DTKS BPS 2022 → estimasi 2023	10.928 KK	Berdasar 2.870 KK prasejahtera DTKS (2021) meningkat ~10% di 2023
Kelurahan Bakung	Estimasi Proporsional	1.540 KK	Proporsi 14% dari total kecamatan, sesuai data DTKS validasi Dinsos

(Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2025)

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung (melalui dokumen DTKS dan publikasi internal 2022) mencatat bahwa Kecamatan Teluk Betung Utara memiliki 2.870 keluarga miskin (prasejahtera) yang terdaftar dalam DTKS, yang dijadikan basis penyaluran PKH . Data ini dapat dianggap lebih valid dibanding estimasi sebelumnya karena berasal langsung dari opname Dinsos.

Dengan pertumbuhan jumlah KPM ~10 % pada tahun 2023 (mengacu pada tren kenaikan alokasi PKH di Lampung), maka estimasi total keluarga penerima di kecamatan tersebut menjadi sekitar 3.157 KK. Menggunakan asumsi Kelurahan Bakung menempati 14 % dari total kecamatan, diperoleh estimasi yang valid sekitar 442 KK penerima PKH pada 2023.

Program ini memberikan dukungan kepada keluarga dalam bentuk bantuan bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) sesuai dengan persyaratan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Menurut Suharto, pemberdayaan secara konsep berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan tetapi tidak hanya terkait pengaruh dan kontrol. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga pada akhirnya mereka memiliki kekuatan atau kekuasaan serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Oleh karena itu, pemberdayaan tidak hanya dapat dikaji berdasarkan konsep kekuasaan seseorang saja, tetapi juga dapat dikaji dengan unsur-unsur lainnya. Unsur-unsur lain dalam pemberdayaan masyarakat dapat terdiri dari unsur kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan pemerataan. Konsep pemberdayaan dalam pandangan ini memiliki cakupan luas tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut namun juga mencakup pengembangan secara keseluruhan, mulai dari aspek manusia, aspek sosial dan aspek ekonomi.

Tujuan distribusi bantuan pendapat bersyarat untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Ketika ekonomi dan pendidikan tumbuh dan pendapatan kebanyakan orang rendah, pemerintah menawarkan dukungan pendapatan bersyarat. Di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan pada tahun 2007 sebagai tahap percontohan dengan harapan program ini dapat berkelanjutan.

Secara nasional, Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kurang lebih 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018 yang merupakan keluarga yang sangat miskin di seluruh Indonesia. Selama pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di bagikan kepada keluarga yang sangat miskin yang berhak menerima manfaat tersebut. Dalam konteks ini pemerintah memperkerjakan pekerja sosial sehubungan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Terdapat banyak sekali kelebihan pada aplikasi Program Keluarga Harapan (PKH) dibandingkan menggunakan program perlindungan sosial lainnya dari pemerintah karena adanya kegiatan atau aktivitas yang membuat pemberdayaan rakyat miskin bisa dimaksimalkan. Adapun pemberdayaan warga adalah suatu proses peningkatan kemampuan, keahlian dan keterampilan warga menggunakan tujuan terwujudnya Program Sosial melalui peningkatan kesejahteraan. Aktivitas yang dilakukan dengan dilaksanakannya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Kerja (P2K2).

Pertemuan tersebut dilaksanakan sekali dalam sebulan dengan maksud dapat mengubah pola pikir masyarakat miskin melalui pemberian edukasi, motivasi dan dorongan mengenai perbaikan kehidupan menjadi lebih baik yang dilakukan oleh para pendamping sosial PKH.

Adanya sistem evaluasi juga bertujuan mengetahui berhasil atau gagalnya, efektif atau tidak efektifnya suatu program yang dilaksanakan sehingga perencanaan kebijakan dapat mempertimbangkan untuk menyusun program baru atau melanjutkan program yang ada dengan meminimalisir kegagalan dan kesalahan dalam pelaksanaan program sebelumnya. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk lebih lanjut meneliti Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“EVALUASI DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KEMISKINAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 (Studi Kasus di Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan di Kota Bandar Lampung”.

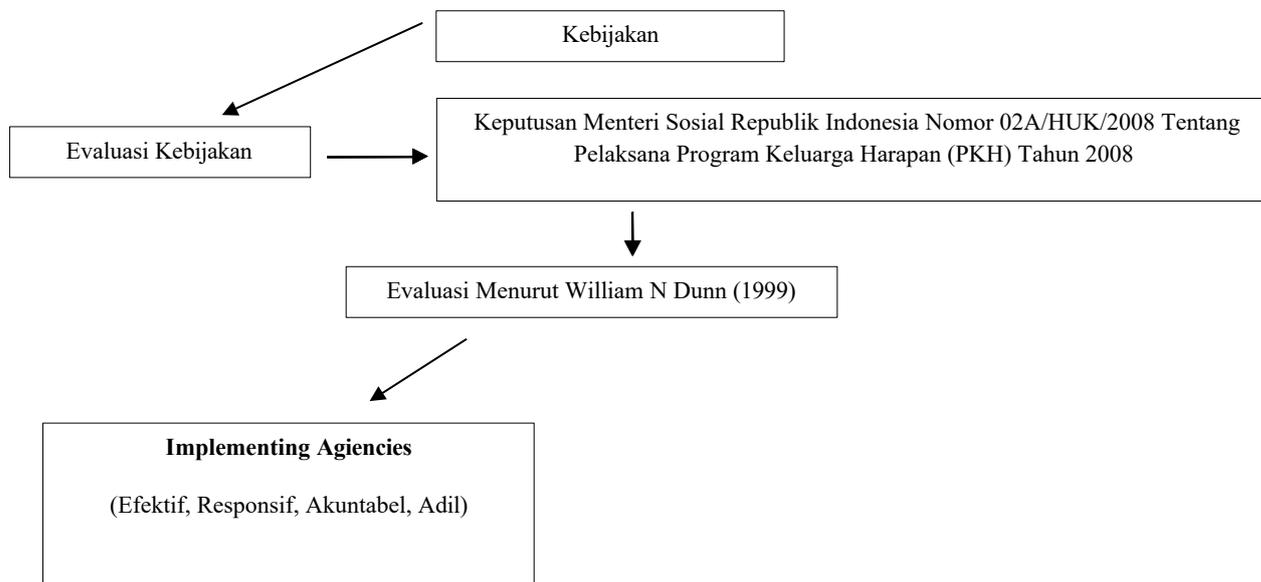
C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah “Memperoleh Gambaran Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan di Kota Bandar Lampung”.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam pembahasan-pembahasan mengenai kebijakan publik serta menjadi bahan masukan atau referensi bagi pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

E. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Arah penelitian digambarkan pada kerangka pikir diatas guna melihat apakah program pengentasan kemiskinan dapat mengurangi angka kemiskinan atau malah sebaliknya, sehingga adakah masalah atas ketidakberhasilan program penanggulangan kemiskinan menggunakan teori William Dunn (1999).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Tinjauan Kebijakan Publik

Ketetapan prinsip-prinsip untuk mengarahkan suatu tindakan yang sistematis dan konsisten dalam upaya untuk mencapai tujuan disebut kebijakan, menurut Suharto (dalam Nelawati, 2015). Kebijakan mengacu pada bagaimana pemerintah bertindak. Dalam kasus ini, Dye mengartikan kebijakan publik sebagai "apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Menurutnya, kebijakan publik mencakup tidak hanya apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Karena kegagalan pemerintah juga berdampak besar pada masyarakat. Karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah, keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak memiliki tujuan. Konsep ini juga berarti bahwa aktor kebijakan membuat kebijakan publik; dalam hal ini, aktor tersebut adalah badan pemerintah, bukan perusahaan swasta (Handoyo, 2012).

Karena memiliki legitimasi yang dibuat oleh lembaga pemerintah, tindakan pemerintah tersebut merupakan tujuan kebijakan publik yang legal dan sah. Interaksi antara negara dan warganya diperlukan untuk membuat keputusan tentang masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai proses interaksi antara negara dan warganya. Suatu kebijakan mencakup pengambilan keputusan dan bagaimana mereka diterapkan. Dan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dalam mengatur masalah publik, seperti penanganan pandemi virus COVID-19, dikenal sebagai kebijakan. Kebijakan publik memiliki aspek positif dan negatif, menurut Hutabarat (2018). Kebijakan dapat mencakup tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi masalah tertentu.

Sebaliknya, kebijakan dapat mencakup keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil keputusan atau melakukan sesuatu mengenai masalah yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Sebagai suatu sistem yang terdiri atas sub-sistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif: dari proses kebijakan dan dari struktur kebijakan. Dari sisi proses kebijakan, terdapat tahap-tahap sebagai berikut: identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari segi struktur terdapat lima unsur kebijakan sebagai berikut:

1. Tujuan Kebijakan

Bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan. Namun tidak demikian semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu. Perbedaan terletak tidak sekedar pada jangka waktu mencapai tujuan dimaksud, tetapi juga ada posisi, gambaran, orientasi dan dukungannya. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria: diinginkan untuk dicapai yaitu:

- a) Tujuan yang diinginkan berarti pertama-tama dapat diterima oleh banyak pihak karena kandungan isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut banyak pihak dan kedua mewakili kepentingan mayoritas atau didukung golongan yang kuat dalam masyarakat.
- b) Tujuan rasional merupakan pilihan yang terbaik dari beberapa alternatif yang diperhitungkan atas dasar kriteria-kriteria yang relevan dan masuk akal. Di sisi lain dalam kaitan dengan kriteria rasional atau realistik (*rational or realistic*). Tujuan biasanya ditetapkan setelah memperhitungkan kedudukan organisasi, peraturan yang berlaku sumber daya yang dimiliki atau dapat dikuasai. Yang dimaksud dari sumber daya adalah faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung manajemen publik ini sumber daya manusia (*human Resources*), *finance, logistics, information, participation and legitimation*.

- c) Tujuan baik dan masuk akal (logis) dan mempunyai gambaran yang jelas, pola pikirnya runtun dan mudah dipahami langkah-langkah mencapainya. Pengertian jelas disini perlu mesti ditunjukkan secara kuantitatif. Yang penting orang dapat membedakan tercapai tidaknya tujuan dimaksud setelah suatu jangka waktu tertentu.
- d) Tujuan berorientasi ke depan (*future oriented*). Ada tiga pengertian tentang orientasi kedepan ini:
 - 1) Tujuan kebijakan di maksud menimbulkan kemajuan kearah yang diinginkan atau berdasarkan angka atau criteria tertentu terlihat peningkatan.
 - 2) Tujuan yang ingin dicapai dimasa depan itu terletak dalam suatu jangka waktu tertent, sehingga setelah suati masa tertentu dapat dilakukan evaluasi atas hasil kebijakan itu.
 - 3) Orientasi sabar dan ulet. Tujuan yang berada kedepan dalam jangka waktu tertentu diukur dalam pengertianb mencapai secara terus menerus tanpa henti.

2. Masalah.

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan kalau pemecahannya dilakukan bagi masalah yang tidak benar.

Dengan cara lain dapat dikatakan, kalau suatu masalah telah dapat diidentifikasi secara tepat, berarti sebagian pekerjaan dapat dianggap sudah dikuasai. Satu hal yang diperlukan dalam kaitan dengan kesalahan pemecahan masalah ini adalah terprosknya orang untuk menganggap gejala sebagai masalah.

3. Tuntutan (*demand*).

Partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju. Partisipasi itu berbentuk dukungan, tuntutan dan tantangan atau kritik seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal. Tergantung pada urgensi dari tuntutan tersebut. Tuntutan muncul antara lain:

- a) Terbaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang di buat oleh pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. Ini terjadi karena mereka tidak mempunyai peluang ikut serta dalam proses perumusan kebijakan, atau karena kalah dalam persaingan antara berbagai kekuatan, sekalipun jumlah mungkin cukup besar dalam masyarakat.
- b) Munculnya kebutuhan baru setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan. Karena itu, tuntutan jangan sekali-sekali dipandang sebagai hal yang negatif, melainkan harus dipandang sebagai sebuah keberhasilan, sekalipun memang merepotkan. Kerepotan terjadi karena perbedaan persepsi dalam memandang tuntutan itu. Hal ini terutama sangat dirasakan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

4. Dampak (*outcomes*)

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Tiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak dalam masyarakat daripada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan. Sesuai dengan cirri kebijakan yang dapat bersifat positif dan negative yang diharapkan terjadi dari suatu tindakan kebijakan. Berapa besar dampak yang terjadi untuk setiap jenis kebijakan susah diperhitungkan. Hal ini disebabkan antara lain karena:

- a) Tidak tersedianya informasi yang cukup. Mungkin data ada di lapangan pada tingkat lokal, tetapi tidak ada data pada intansi tingkat nasional atau daerah.

- b) Sebab itu peran serta masyarakat bawah dalam proses penyusunan dan penilaian suatu kebijakan yang sangat penting.
 - c) dalam bidang sosial, pengaruh dari suatu kebijakan perlu dilakukan pemisahan antar kelompok variable yang diukur (*control group*) dengan kelompok yang tidak diukur (*non-control group*).
 - d) proses berjalannya pengaruh dari suatu kebijakan di bidang sosial sudah diamati. Proses tersebut berbeda dalam tiap masyarakat dan tiap sector.
5. Sarana atau alat kebijakan (*policy instruments*).

Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri

2, Dampak Kebijakan

Saat berbicara tentang dampak kebijakan, Dye mengacu pada semua dampak yang dihasilkan oleh suatu kebijakan dalam kehidupan nyata, termasuk perubahan sikap atau tingkah laku yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. Dampak kebijakan berbeda dengan hasil kebijakan, juga dikenal sebagai "hasil kebijakan". Hasil kebijakan menggambarkan apa yang dihasilkan oleh penerapan suatu kebijakan atau program. Ada beberapa dimensi yang harus diperhitungkan saat menilai dampak kebijakan. Di bawah ini adalah dimensi yang dijelaskan oleh Dye :

- a. Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) atau yang tidak diharapkan (*unintended consequences*), baik pada masalahnya maupun masyarakat.
- b. Dampak kebijakan pada keadaan atau kelompok lain di luar sasaran atau tujuan utama kebijakan tersebut. Dampak kebijakan ini biasanya disebut sebagai eksternalitas atau dampak kebijakan yang melimpah atau limbah.
- c. Pengaruh kebijakan terhadap kondisi saat ini dan masa depan Dengan kata lain, apakah suatu kebijakan atau program dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan secara langsung dalam jangka pendek atau jangka panjang

- d. Pengaruh kebijakan terhadap biaya langsung, atau biaya langsung, yang dikeluarkan untuk membiayai kebijakan atau program tersebut; dan
- e. Pengaruh kebijakan terhadap biaya tidak langsung, atau biaya tidak langsung, yang dialami masyarakat (Wumu et al., 2019).

Dari peraturan, program, maupun kebijakan akan menimbulkan suatu dampak baik secara positif maupun negatif. Dampak positif sebagai dampak yang diharapkan akan terjadi sesuai tujuan kebijakan dan memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan.

Sedangkan dampak negatif sebagai dampak yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan dan tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan. Selain itu, evaluasi dapat membantu dalam menciptakan revisi atau alternatif kebijakan baru dengan menunjukkan bahwa kebijakan yang lebih disukai sebelumnya harus dihapus dan diganti dengan yang baru (Bardach, E. 2008).

Evaluasi terdiri dari dua komponen yang saling terkait: penggunaan berbagai pendekatan untuk melacak hasil dari kebijakan publik, program, dan aplikasi melalui serangkaian nilai untuk menentukan apakah hasil tersebut bermanfaat bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan bahwa elemen yang saling berhubungan ini menunjukkan bahwa fakta dan premis nilai ada di setiap tuntutan evaluasi.

Namun, banyak aktivitas yang disebut sebagai "evaluasi" dalam analisis kebijakan pada dasarnya tidak bersifat evaluatif, karena fokusnya terutama pada produksi tuntutan designative (faktual) daripada tuntutan evaluatif. Jadi, "penelitian evaluasi" atau "evaluasi kebijakan" membutuhkan pendekatan (Bardach, E., 2008).

3. Evaluasi Kebijakan

Estimasi atau penilaian kebijakan termasuk substansi, implementasi, dan dampak. Dianggap sebagai suatu kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dilakukan. Artinya, evaluasi kebijakan mencakup seluruh proses kebijakan, bukan hanya tahap akhir.

W. Dunn mengatakan bahwa istilah "evaluasi" dan "evaluasi" masing-masing mengacu pada penerapan berbagai skala nilai terhadap hasil program dan kebijakan. Kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian, dan perumusan masalah kembali adalah semua komponen evaluasi.

Dalam analisis kebijakan, evaluasi melakukan beberapa peran penting. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan, yaitu seberapa jauh tindakan publik dapat memenuhi kebutuhan, nilai, dan kesempatan.

Dalam kasus ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi membantu dalam klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target tersebut. Nilai-nilai ini diperjelas dengan memberikan gambaran tentang nilai Ketiga, evaluasi membantu analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan saran. Perumusan ulang masalah kebijakan dapat disebabkan oleh informasi tentang kinerja kebijakan yang buruk.

B. Tinjauan Tentang Kemiskinan

1. Konsep Dasar Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana pendapatan tahunan individu disuatu daerah tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di daerah itu, individu yang hidup di bawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Seseorang dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian daerah tersebut. Secara absolut, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya secara absolut berada di bawah tingkat subsisten atau dengan istilah yang lebih umum dibawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan (GK) menurut BPS, adalah batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan (BPS, 1990). Menurut Sajogyo (1977) garis kemiskinan adalah setara dengan harga 240 kilogram beras per orang per tahun untuk pedesaan dan 360 kilogram per orang per tahun untuk perkotaan. Dalam perkembangan selanjutnya ketentuan garis kemiskinan pun berubah menjadi lebih rinci lagi, yaitu di bawah 240, 240-320, 320-480 dan lebih dari 480 kilogram ekuivalen beras. Klasifikasi ini tampaknya mampu mengelompokkan penduduk secara lebih rinci, kelompok paling bawah disebut sangat miskin, selanjutnya miskin, hampir berkecukupan dan terakhir berkecukupan.

Sedangkan Todaro (2006) mengatakan, besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (poverty line). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah “garis 16 Universitas Indonesia kemiskinan internasional”, garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US\$1 atau \$2 per hari dalam dolar paritas daya beli (PPP). Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Berdasarkan publikasi BPS (2009), penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali dilakukan pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret. Sebagai informasi tambahan, digunakan pula hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) yang dipakai untuk memperkirakan proporsi pengeluaran masing-masing komoditi pokok non-makanan.

Mengikuti definisi BPS, penduduk miskin adalah mereka yang tidak mampu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-makanan (GKNM).

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS, 2009). Menurut Soedjatmoko (1984:114), pengertian pembangunan manusia lebih ditujukan peningkatan kualitas yang mendukung human growth (pertumbuhan manusia), yaitu bangkitnya rakyat, yang tanpa merasa kurang dari orang lain, secara sosial efektif dan merasa mampu serta bebas memikul tanggungjawab bagi kehidupannya sendiri, bagi keluarga dan komunitasnya. Sementara Emil Salim (1980), mengemukakan bahwa kemiskinan umumnya dilukiskan sebagai rendahnya pendapatan untuk memenuhi kehidupan pokok. Pendekatan kemiskinan yang didasarkan atas pendapatan ini tidak dengan sendirinya memberikan gambaran yang sempurna atau memadai tentang kemiskinan pada umumnya.

Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan: Pertama, bagi kelompok termiskin diantara orang-orang miskin keadaan hidupnya lebih buruk dari pada yang dinyatakan dengan angka-angka pendapatan per kapita, Kedua, angka-angka tersebut tidak menunjukkan pendapatan riil dari masyarakat pedesaan, Ketiga, perbandingan pendapatan ini didasarkan pada nilai-nilai mata uang yang selalu berubah-ubah di dalam proses tukar-menukar, sehingga validitasnya meragukan bila dibandingkan taraf hidup yang ada.

Masri Singarimbun (1976), mencirikan miskin hakekatnya memiliki ciri-ciri: pendapatan rendah, gizi yang rendah, tingkat pendidikan rendah, keterampilan rendah dan harapan hidup pendek, ciri-ciri tersebut harus menjadi dasar pemahaman para penentu kebijakan, kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensi tidak dapat dipandang dari satu sisi saja dikarenakan kemiskinan memiliki permasalahan yang saling kait mengkait.

Menurut Sen (1999), kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak.

Teori neo-liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill. Intinya menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Dalam bidang ekonomi, karya monumental Adam Smith, *The Wealth of Nation* (1776), dan Frederick Hayek, *The Road to Serfdont* (1944), dipandang sebagai rujukan kaum neo-liberal yang mengedepankan azas *laissez iaire*, yang oleh Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:72) disebut sebagai ide yang mengunggulkan "mekanisme pasar bebas" dan mengusulkan "*the almost complete absence of state's intervention in the economy*".

Para pendukung neo-liberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat "residual", sementara dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai "penjaga malam" yang baru boleh ikut carnpur manakala lembaga-lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya (Shannon ,1991; Spicker, 1995; Cheyne. O'Brien dan Belgrave, 1998).

Penerapan program-program structural adjustment, seperti program jaring pengaman sosial (JPS) di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sesungguhnya merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neo-liberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan ini. Keyakinan yang berlebihan terhadap keunggulan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi yang secara alamiah dianggap akan mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial mendapat kritik dari kaum demokrasi-sosial.

Berpijak pada analisis Karl Marx dan Frederick Engels, pendukung demokrasi-sosial menyatakan bahwa "*a free market did not lead to greater social wealth, but to greater poverty and exploitation... a society is just when peoples needs are met, and when inequality and exploitation in economic and social relations are eliminated*" (Cheyne, O'Brien dan Belgrave, 1998: 91 dan 92).

Teori demokrasi-sosial memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Teori ini berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran (*mixed economy*) dan "ekonomi manajemen-permintaan" (*demand management economics*) gaya Keynesian yang muncul sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an. Karakteristik Penduduk Miskin Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya (*reliable*) dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada perbaikan kondisi hidup orang miskin (BPS, 2009).

2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Todaro (2006), tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu: 1) Tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan 2) Lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Jelas, bahwa setinggi apa pun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian sebaliknya, seberapa pun distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemelaratan juga akan semakin meluas.

Ravallion dan Datt (1996), kemiskinan memperoleh keuntungan dari (kota dan desa), pertumbuhan ekonomi di sektor non pertanian yakni kemampuannya untuk menarik pekerja dari ekonomi pertanian desa miskin dan sektor informal kota yang miskin, dimana telah diakui bahwa apabila sebenarnya bobot yang diberikan pada sektor ini seperti sama dengan di sektor non pertanian, sebenarnya juga akan lebih menguntungkan dengan memperbaiki manajemen, teknologi dan meningkatkan pengetahuan pekerja di sektor tersebut. Haidy (tanpa tahun), yang melihat sektor formal dan informal, dimana sektor informal lebih banyak menyerap tenaga kerja berkisar 65 persen sampai dengan 70 persen menggunakan data SUPAS dan Sensus. Sektor informal banyak melibatkan pekerja keluarga (family worker), seperti halnya yang terjadi di sektor pertanian, maka apabila pemerataan hasil pembangunan menghendaki pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan sektor informal relatif lebih cepat dari pada yang diciptakan sektor formal, kecuali apabila kebijakan lebih mengarah pada pertumbuhan bukan lagi pemerataan hasil pembangunan.

Menurut Kartasasmita (1996), ada 4 faktor penyebab kemiskinan, antara lain:

1. Rendahnya tingkat pendidikan, menyebabkan pengembangan diri yang terbatas
2. Rendahnya tingkat kesehatan, tingkat kesehatan dan tingkat gizi yang rendah menyebabkan daya tahan fisik, daya pikir serta prakarsa menjadi rendah pula, dengan demikian produktivitas yang dihasilkan menjadiberkurang, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, akibatnya *bargaining position* mereka dalam hampir seluruh kegiatan ekonomi menjadi lemah
3. Terbatasnya lapangan kerja, selama lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha masih ada, harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan masih dapat dilakukan
4. Kondisi keterisolasian, dalam kondisi terpencil atau terisolasi penduduk akan kurang mampu menjalankan perekonomiannya.

Pendapat Hadiwegono dan Pakpahan (1993), bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- (a) Sumber daya alam yang rendah
- (b) Teknologi dan unsur penduduknya yang rendah
- (c) Sumber daya manusia yang rendah
- (d) Sarana dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000:107), kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah. Menurut Samuelson dan Nordhaus (1997), bahwa penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan, oleh karena itu, upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf dan peningkatan keterampilan penduduknya, kelima hal itu adalah suatu upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM).

Penelitian yang dilakukan oleh Faturohman dan Molo (1994), mencakup rumah tangga miskin di Yogyakarta, bahwa status ekonomi rumah tangga berbanding terbalik dengan jumlah anggota rumah tangga, dengan kata lain, makin buruk status rumah tangga, makin banyak anggota rumah tangga. Dilihat dari pendekatan bahwa rumah tangga dengan kepala keluarga yang miskin lebih banyak yang tidak bersekolah, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi. (Todaro, 2006)

Todaro (2006), dalam teori siklus populasi-kemiskinan (*population-poverty cycle*), yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat mendorong timbulnya berbagai macam masalah ekonomi, sosial dan psikologis, juga menghalangi prospek tercapainya kehidupan yang lebih baik karena mengurangi tabungan rumah tangga dan negara, disamping itu jumlah penduduk yang terlalu besar akan menguras kas pemerintah yang sudah sangat terbatas untuk menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, ekonomi dan sosial bagi generasi baru.

Melonjaknya beban pembiayaan atas anggaran pemerintah tersebut jelas akan mengurangi kemungkinan dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup generasi dan mendorong terjadinya transfer kemiskinan kepada generasi mendatang yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah.

Hal ini akan menyebabkan terjadinya lingkaran setan kemiskinan/ *the vicious circle of poverty*, yaitu penduduk miskin dengan pendapatan rendah merasa harus menambah anak untuk meringankan beban kemiskinannya, karena anak dianggap sumber tenaga kerja murah dan sandaran hidup di hari tua, padahal keluarga besar berarti penambahan penduduk yang semakin cepat, penambahan jumlah penduduk yang cepat cenderung menurunkan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita, penurunan tingkat pendapatan per kapita akan menurunkan tingkat tabungan, penurunan tingkat tabungan akan menurunkan tingkat investasi masyarakat baik pada pendidikan dan kesehatan, karena dengan keluarga besar dan pendapatan yang rendah akan mempersempit peluang orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan angka fertilitas yang tinggi cenderung merugikan kesehatan ibu dan anak-anaknya, tingkat investasi yang turun akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan akhirnya akan menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin parah. Dengan demikian, argumen ini secara tegas memandang penambahan jumlah penduduk sebagai penyebab sekaligus akibat kemiskinan.

Menurut Todaro (2006), paling tidak terdapat lima alasan mengapa kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan tidak harus memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mempunyai akses terhadap pinjaman kredit, tidak mampu membiayai pendidikan anaknya dan dengan ketiadaan peluang investasi fisik maupun moneter, mempunyai banyak anak sebagai sumber keamanan keuangan di masa tuanya nanti. Faktor-faktor ini secara bersama-sama menyebabkan pertumbuhan per kapita lebih kecil dari pada jika distribusi pendapatan lebih merata
2. Akal sehat, yang didukung dengan banyaknya data empiris terbaru, menyaksikan fakta bahwa, tidak seperti sejarah yang pernah dialami oleh negara-negara yang sekarang sudah maju, kaum kaya di negara-negara miskin sekarang tidak dikenal karena hematnya atau hasratnya mereka untuk menabung dan menginvestasikan bagian yang besar dari pendapatan mereka di dalam perekonomian negara mereka sendiri.

3. Pendapatan yang rendah dan standar hidup yang buruk yang dialami oleh golongan miskin, yang tercermin dari kesehatan, gizi dan pendidikan yang rendah, dapat menurunkan produktivitas mereka dan akibatnya secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perekonomian tumbuh lambat. Strategi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup golongan miskin tidak saja akan memperbaiki kesejahteraan mereka, tetapi juga akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan seluruh perekonomian (Dasgupta, 1987).
4. Peningkatan pendapatan yang lebih besar kepada golongan miskin akan mendorong kenaikan permintaan produk kebutuhan rumah tangga buatan lokal, seperti makanan dan pakaian, secara menyeluruh, sementara golongan kaya cenderung membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk barang-barang mewah impor. Meningkatkan permintaan akan barang-barang buatan lokal memberikan rangsangan yang lebih besar kepada produksi lokal, memperbesar kesempatan kerja lokal dan menumbuhkan investasi lokal. Permintaan seperti ini akan menciptakan kondisi bagi pertumbuhan ekonomi yang cepat dan partisipasi rakyat banyak di dalam pertumbuhan itu (Hicks, 1979 dan Marshall, 1988)
5. Penurunan kemiskinan secara masal dapat menstimulasi ekspansi ekonomi yang lebih sehat karena merupakan insentif materi dan psikologis yang kuat bagi meluasnya partisipasi publik di dalam proses pembangunan. Sebaliknya, lebarnya kesenjangan pendapatan dan besarnya kemiskinan absolut dapat menjadi pendorong negatif materi dan psikologis yang sama kuatnya terhadap kemajuan ekonomi. Kondisi ini bahkan dapat menciptakan penolakan masyarakat luas terhadap kemajuan dan ketidaksabaran terhadap laju pembangunan atau terhadap kegagalan untuk mengubah kondisi material mereka (Allesina, 1994).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat dan penanggulangan kemiskinan bukanlah tujuan yang saling bertentangan. Bank Dunia (1990), menyatakan bahwa, diskusi mengenai kebijakan yang berkenaan dengan golongan miskin biasanya berfokus kepada trade-off antara pertumbuhan dan kemiskinan.

C. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Tinjauan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan sosial merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Adapun berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu diantaranya:

a) Program di Bidang Pangan

- 1) Beras Sejahtera (Rastra) / Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
- 2) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

b) Program di Bidang Pendidikan

- 1) Program Indonesia Pintar (PIP)
- 2) Program Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat (Bidikmisi)
- 3) Program Keterampilan Hidup

c) Program di Bidang Kesehatan

- 1) Program Indonesia Sehat (PIS)

d) Program di Bidang Sosial dan Ekonomi

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH)
- 2) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- 3) Program Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- 4) Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK)
- 5) Asistensi Sosial bagi penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)
- 6) Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)

Berbagai bentuk program bantuan sosial dari pemerintah merupakan suatu kekuatan sekaligus tantangan bagi pemerintahan. Karena program bantuan sosial dapat menunjukkan adanya keberhasilan bahkan kegagalan, seperti halnya dalam masalah penargetan penerima bantuan sosial.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan memperbaiki pengelolaan apabila terjadi kendala sebaik mungkin. Salah satu program bantuan sosial di bidang sosial dan ekonomi yang menjadi target peneliti dalam melakukan penelitiannya yaitu bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 1 menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka akses bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak sekolah untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga miskin memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk menjadi *episentrum* dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Misi besar Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, dan menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Tinjauan Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program prioritas nasional dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI dan bekerjasama dengan mitra kerja, antara lain:

- a) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI berperan mengkoordinasikan penyelenggaran seluruh program penanggulangan kemiskinan.
- b) Kementerian PPN/Bappenas, berperan dalam perencanaan serta monitoring dan evaluasi program.
- c) Kementerian Keuangan RI, sebagai bendahara urusan negara memberikan dukungan anggaran dan regulasi penyaluran bantuan sosial.
- d) Kementerian Kesehatan RI, sebagai penyedia layanan kesehatan dan membantu pelaksanaan verifikasi kesehatan.
- e) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI, berperan sebagai penyedia layanan pendidikan dan membantu pelaksanaan verifikasi pendidikan.
- f) Kementerian Komunikasi Dan Informasi RI, berperan dalam pelaksanaan sosialisasi PKH secara nasional.
- g) Kementerian Dalam Negeri RI, berperan dalam memfasilitasi penerbitan data kependudukan KPM PKH.
- h) Badan Pusat Statistik (BPS), berperan dalam pelaksanaan pendataan kemiskinan untuk Basis Data Terpadu.
- i) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan (sharing) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

3. Tinjauan Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun adanya Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan:

- a) Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan.
- e) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

4. Sasaran dan Kriteria Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, serta memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Adapun kriteria komponen Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri atas:

- a) Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - 2) Ibu hamil/menyusui.
 - 3) Anak berusia 0 – 6 tahun.
- b) Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - 1) Anak SD/MI atau sederajat.
 - 2) Anak SMP/MTS atau sederajat.
 - 3) Anak SMA/MA atau sederajat.
 - 4) Anak usia 6 – 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- c) Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - 1) Lanjut usia mulai dari usia 60 tahun.
 - 2) Penyandang disabilitas berat.

5. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Hak yang harus diterima bagi Keluarga Penerima manfaat PKH, diantaranya:

- a) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- b) Mendapatkan layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota keluarga sesuai kebutuhannya.
- c) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementer penanggulangan kemiskinan lainnya.

Agar dapat memperoleh bantuan tunai sesuai dengan yang diterapkan oleh pemerintah, peserta PKH wajib memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH, diantaranya:

a) Ibu Hamil / Nifas

- (a) Pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali dalam 3 kali trimester.
- (b) Melahirkan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
- (c) Pemeriksaan kesehatan sebanyak 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan.

2) Bayi Usia 0 – 11 Bulan

- (a) Usia 0 – 11 bulan harus imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan.
- (b) Usia 6 – 11 bulan harus mendapat suplemen vit A.

3) Balita Usia 1 – 7 Tahun

- (a) Usia 1 – 5 tahun harus imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan untuk setiap bulannya.
- (b) Usia 5 – 6 tahun harus pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapatkan vit A sebanyak 2 kali dalam setahun.
- (c) Usia 6 – 7 tahun harus timbang badang di fasilitas kesehatan.

4) Anak Sekolah Usia 6 – 21 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan (SD, SMP, SMA)

- (a) Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan.
- (b) Minimal 85% kehadiran dikelas.

5) Lansia Miskin Usia 70 Tahun Ke atas

- (a) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
- (b) Mengikuti kegiatan sosial (day care dan home care).

6) Penyandang Disabilitas Berat

- (a) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan.
- (b) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (*home care*).

Fungsi dari evaluasi kebijakan (Dunn, 2003:610) adalah:

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan. Yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mengidentifikasi dan mengoprasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target da'lam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai (kelompok kepentingan, pegawai negeri, kelompok-kelompok klien), maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, dan substantif).
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisi ulang.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, metode ini relevan dan sesuai dengan penelitian yaitu untuk memperoleh pemahaman mengenai evaluasi dampakn PKH sebagai upaya mengurangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Pendekatan kualitatif juga dapat mengungkap secara komprehensif bagaimana proses kebijakan publik dari tahap awal hingga tahap akhir. Sehingga tujuan penelitian pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami bagaimana proses dan mengungkap makna dari setiap fenomena PKH menurut persepsi masyarakat dan pemerintah Kota Bandar Lampung maupun dengan dukungan teoritik yang dibangun dalam kerangka pikir.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bersifat penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif, hal ini untuk memandu dan mengarahkan penelitian. Fokus penelitian memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pengumpulan data yang diambil dari lapangan akan lebih spesifik dan tidak terlalu melebar ke permasalahan-permasalahan yang tidak berkaitan dengan penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi study kualitatif sekaligus membatasi penelitian untuk memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan.

Dengan demikian dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena fokus penelitian memberikan batasan. Penelitian ini difokuskan kepada proses evaluasi, dengan model evaluasi Willaim Dunn, indikator-indikator model tersebut adalah :

1. Implemeting Agencies

- a) Efektif suatu program diukur dengan jumlah bantuan yang diberikan
- b) Responsif adalah tanggapan bagaimana masyarakat terhadap bantuan tersebut
- c) Akuntabel adalah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kebijakan
- d) adil dalam melaksanakan kebijakan dengan sama rata

2. Efek dan Dampak

- a) Output adalah hasil dari kebijakan yang diinginkan sesuai dengan visi misi kebijakan yang bersifat langsung di masyarakat
- b) Outcome adalah efek dan dampak jangka panjang dalam pelaksanaan PKH

C. Lokasi Penelitian

Penetapan penelitian ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup wilayah Kota Bandar Lampung, yaitu di Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*), melalui wawancara yang bertindak sebagai perencana dan pelaksana dalam pengumpulan data, melakukan analisis, menafsirkan dan melakukan laporan evaluasi PKH. Peneliti mewawancarai informan dan mencatat sebagai informasi yang berkaitan dengan masalah tentang evaluasi PKH di Kota Bandar Lampung. Selain peneliti (*human instrument*) peneliti menggunakan beberapa alat untuk mendukung dan memperlancar penelitian yaitu: pedoman wawancara, alat tulis kerja (ATK), voice recorder, kamera, laptop.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang lebih menekankan pada aspek materi. Menurut Loftland dalam Moleong (2002;157), sumber data utama pada penelitian. Kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti sumber data tertulis. Data dalam bentuk kata verbal sering muncul dalam kata yang berbeda dengan maksud sama atau sebaliknya. Dapat juga muncul dalam kalimat panjang lebar, singkat dan banyak dan banyak lagi ragamnya. Data variabel yang beragam tersebut perlu diolah agar menjadi ringkas dan sistematis.

Dalam penelitian ini menggunakan dua macam data, menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumber datanya, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui di lapangan. Dalam hal ini, berupa data informasi hasil wawancara dengan pihak yang menjadi pelaksana PKH. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang “Evaluasi Dampak PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung.” Penentuan informal dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dilakukan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip, serta data dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan PKH. Data sekunder diperoleh dari hasil laporan tertulis (penelaahan dokumen) instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan dan Transmigran Kota Bandar Lampung, pengumpulan literature, karya-karya tulis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan PKH.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara yang dilakukan secara mendalam (*in depth interview*), wawancara mendalam merupakan Tanya jawab mengenai masalah evaluasi PKH antara peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka. Untuk itu pedoman wawancara yang bersifat terbuka sebagai instrument penelitian evaluasi PKH digunakan untuk memberikan kebebasan bagi informan untuk menyampaikan pendapatnya tentang “Evaluasi Dampak PKH Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung”. Pada penelitian ini yang menjadi informal adalah mereka yang ditentukan sesuai dengan kepemilikan informasi yang kredibel tentang evaluasi PKH.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap suatu objek, dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi/pengamatan langsung terhadap fenomena atau gejala yang terjadi di lapangan. Observasi juga dimasukkan untuk lebih mengetahui kondisi di lapangan secara mendalam mengenai proses pelaksanaan evaluasi PKH yang dilakukan secara langsung dan nyata. Pengamatan dilakukan terhadap berbagai pihak yang menjalankan evaluasi PKH, serta kegiatan-kegiatan dalam evaluasi PKH, serta kegiatan-kegiatan dalam evaluasi PKH di Kota Bandar Lampung.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik menghubungkan data yang diperoleh peneliti sebelum, selama dan setelah dilaksanakan penelitian hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasution dalam Sugiyono (2013:336), bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses menyusun data yaitu, mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola atau kategori agar dapat ditafsirkan, yang dilakukan melalui tuga macam kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung sebagaimana yang dikemukakan oleh Creswell (2010:153), yaitu:

- a) Reduksi data, mengumpulkan informasi yang didapat dan menyederhanakan informasi tersebut, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema atau pola dari laporan atau data yang didapat dilapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, disamping mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.
- b) Display data atau pengajuan penyajian data, menyajikan berbagai informasi dari data yang telah dianalisis sehingga memberikan gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan.
- c) penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan kegiatan analisis data yang dimaksudkan untuk mencari makna dan membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan hipotesis kerja.

G. Pengujian Validitas Reliabilitas

1. Uji Kredibilitas

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang menjemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian ini peneliti melakukan uji kredibilitas dengan cara sebagai berikut:

a) Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan supaya mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh maupun untuk menemukan data-data yang baru.

b) Trianguasi

Trianguasi data adalah (teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh peneliti pada pihak-pihak lainnya yang dipercaya) untuk mendapatkan data yang valid dengan mengecek kebenaran informasi yang didapat dilapangan, bahwa informasi perlu dicek kebenarannya agar hasil peneliti dapat dipercaya dengan memperoleh informasi dari berbagai pihak. Dengan demikian maka apabila terdapat perbedaan keterangan diantara informan yang memberikan informasi mengenai evaluasi PKH, maka penulis akan kembali menanyakan perbedaan keterangan tersebut kepada informan lainnya yang dianggap relevan, guna memperoleh suatu kebenaran data.

c) Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara

d) Mengadakan member cek

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data, berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah penemuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

2. Penguji *Transferability*

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan dengan teliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat peneliti diselenggarakan. Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggungjawaban.

3. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *Confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektif penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil peneliti telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan, dengan cara menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, dapat disimpulkan bahwa program ini telah berjalan cukup efektif dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sesuai target dan waktu yang telah ditentukan. Responsivitas para pelaksana program, terutama pendamping sosial, juga tergolong baik melalui kegiatan edukatif seperti P2K2. Dari sisi akuntabilitas, meskipun pelaporan sudah cukup tertib, masih terdapat kelemahan dalam proses verifikasi dan validasi data KPM yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran. Dalam aspek keadilan, masih ditemukan masyarakat miskin yang tidak terjangkau bantuan akibat keterbatasan kuota dan tidak mutakhirnya data penerima manfaat.

Output program ini tampak dari meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, outcome jangka panjang masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada bantuan tunai dan belum optimalnya pemberdayaan ekonomi KPM. Secara keseluruhan, pelaksanaan PKH memberikan kontribusi positif dalam mendukung pengentasan kemiskinan, meskipun masih diperlukan berbagai perbaikan dalam tata kelola dan sinergi program yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi positif dalam pengentasan kemiskinan. Meski demikian, sejumlah kendala dalam aspek keadilan distribusi bantuan dan ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan tunai masih menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu melakukan pemutakhiran dan validasi data keluarga miskin secara rutin dan akurat melalui pelibatan RT/RW dan pendamping PKH, agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
2. Pendamping sosial PKH disarankan untuk lebih intensif memberikan edukasi dan pelatihan kewirausahaan kepada KPM agar dapat mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan tunai.
3. Diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga seperti Dinas Sosial, Puskesmas, sekolah, dan kelurahan untuk menjamin sinergi dalam pelaksanaan dan evaluasi program secara menyeluruh.
4. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan PKH, termasuk pelatihan keterampilan dan akses pembiayaan usaha mikro.
5. Evaluasi dampak PKH perlu dilakukan secara periodik dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat penerima manfaat, agar kebijakan yang dihasilkan lebih kontekstual dan solutif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Budi, Winarno. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Kebijakan Publik Edisi Revisi*, Media Presindo. Yogyakarta
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. 2019. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, hlm 25-27.
- Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2017. *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun*, Kementrian Sosial RI, hlm 14-15.
- Syafiie dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. Rineka Cipta : hlm 107
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta : hlm 07
- James, E. Anderson, *Public Policy Making*, Second Edition (New York ;Houghton Miffilincompani 1994) hlm 14
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy :Analisis Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*. ITS Press. Surabaya. hlm. 139
- Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik: Partisipasi Dalam Proses Kebijakan* (Jakarta:Pancur Siwah 2004) hlm 45-54
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Suharsono. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.Yogyakarta
- Syafiie dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. Rineka Cipta : hlm 107
- Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. 2019. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Kementrian Sosial RI, hlm 9.
- Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2018. *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, Dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*, Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia,hlm 4-5.